

## Pemilu Serentak Minim Kualitas

**SEMARANG** - Pemilu serentak 2019 dinilai akan hemat biaya namun kualitas hasilnya dinilai tak beda dengan pemilu saat ini. Pemilih yang dihadapkan pada lima kotak pemilihan sekaligus dalam sekali waktu dinilai menjadi salah satu penyebabnya.

Menurut Peneliti Senior LIPI Prof Dr Syamsuddin Haris, pemilu serentak akan memilih lima lembaga sekaligus, yakni presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Dalam kondisi itu, pemilih dianggap akan serampangan dalam menentukan pilihannya.

"Kualitas pemilihan dipertaruhkan. Ada potensi asal coblos," kata Syamsuddin saat menjadi dosen tamu di kuliah umum Program Doktor Ilmu Sosial Undip

Semarang, Rabu (29/11).

Alasan kedua mengapa minim kualitas, karena hasil pemilu tersebut tak memberikan dampak penguatan pada sistem presidensial. Padahal agenda utama pemilu adalah memperkuat sistem pemerintahan.

Sebagai solusi, menurutnya, pemilu serentak harus dipisah. Yakni pemilu serentak tingkat nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil, DPR RI, dan DPD RI. Sementara pemilu serentak tingkat lokal meliputi pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota), anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Pemisahan seperti itu dinilai pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Teknis Sosial Humaniora Dewan Riset Nasional ini akan memberikan dampak

positif memperkuat sistem presidensial. Asumsinya, hasil pileg yang dilakukan bersamaan dengan pilpres akan condong mengikuti hasil pilpres. Kandidat presiden yang kuat akan meningkatkan elektabilitas kader dari partai yang mengusung calon presiden yang bersangkutan.

Misalnya, elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 tinggi dan dia dicalonkan lagi. Maka partai-partai koalisi yang mengusung Jokowi akan mendapatkan imbas positif dengan memperoleh dukungan pula dari masyarakat.

Dengan demikian, dukungan parlemen pada presiden akan kuat dan mengefektifkan kinerja pemerintah. Hasil pemilu di tingkat pusat, lanjutnya, memiliki peluang yang sama dengan hasil pemilu di tingkat lokal.

"Ini akan mengefektifkan pemerintah. Kalau sekarang kan tidak. Misalnya ada bupati/wali kota yang tak mau dikoordinasi oleh gubernur karena beda partai," lanjutnya.

Lebih jauh, Syamsuddin juga mengkritisi UU Pemilu yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya aturan itu tak relevan dengan sistem presidensial.

Apalagi dasar ambang batas yang digunakan adalah pileg tahun sebelumnya, dimana peta politik sudah berubah. "Ini konyol. *Masak* pemilihan presiden didikte hasil pileg. Sistem kita bukan parlementer," ujarnya.

Untuk itu ia berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait aturan tersebut. Jika dikabulkan maka konsekuensinya semua parpol bisa mengusung calon presiden dan wakilnya sendiri. (H81-67)